

PRIYAYI DAN FASHION; PERUBAHAN CARA BERPAKAIAN PRIYAYI KECIL SURAKARTA 1900-1920

Muhammad Misbahuddin^{1*}

¹IAI Sunan Giri Ponorogo

E-mail: *historianmisbahuddin@gmail.com

No. WA:

Abstract: Clothing is not limited to fabrics that cover the body. For a long time it took even centuries, especially when people started to recognize civilization. Clothing became an extension of the social body in their social life. In Javanese culture, self-esteem is in words, while body honor is in clothing. It's just that this phrase is only used by the elite in Surakarta and doesn't apply to ordinary people. At the beginning of the 20th century, along with the rise of the common people to the upper middle class, the struggle for elite status was fought through the wearing of clothes. Using historical methods of analysis and multidimensional approaches, the author attempts to demonstrate the complexity of the struggle of ordinary people to reach the position of the upper middle class by wearing clothes. The sacralization of clothing, long lauded by the elite, began to de-sacralize at the beginning of the 20th century. De-sacralization is symbolized by the elegant and elegant posture of the little Surakarta priyayi. This attitude has an ambiguous impact on the social reality in which new civic experiences arise in society.

.Keyword: *clothing; Javanese culture; Honour; Dandy; Elegant*

Pendahuluan

Surakarta merupakan salah satu bagian dari Vostenlanden.¹ Secara administrasi Surakarta berbatasan dengan daerah Yogyakarta, Kedu, Semarang dan Madiun. Sejak berdirinya kerajaan Surakarta 1745 M, penduduk yang menghuni kota ini dapat dikatakan homogen, mulai dari orang Jawa, Belanda, Cina, Arab, dan masyarakat timur lainnya bertempat tinggal di kota ini.

Akhir abad XIX merupakan titik kulminasi dari kolonialisme di Surakarta. Setelah berhasil menguasai hampir seluruh Nusantara pada awal abad ke-18. Pengusaha-pengusaha asing mulai bermunculan hampir di setiap sudut kota. Oleh karena itu, Rudolf Mrazek mendeskripsikan bahwa hampir seluruh Jawa tidak terkecuali di Surakarta sejak pembukaan awal jalan Deandeles tahun 1808 yang disebut sebagai *grootte postweg* (jalan raya besar) mengalami proses pembataran.² Pesan-pesan

¹ Pergolakan politik di kerajaan Mataram menyebabkan terpecahnya kerajaan ini menjadi dua kerajaan 1755. Namun pemisahan tersebut tidak menyebabkan berhentinya gejala politik tersebut, bahkan menjadi gejala tersebut lebih parah, dengan terpecahnya menjadi empat kerajaan. Hal itu memberikan konsekuensi tersendiri bagi kerajaan-kerajaan eks kerajaan Mataram tersebut dan pemerintah kolonial yang sedang berkuasa saat itu. Bagi kerajaan-kerajaan tersebut batas-batas kekuasaan mereka semakin terpecah-pecah, sehingga tidak jarang wilayah kekuasaan satu kerajaan berada di wilayah kerajaan lain. Kondisi itu memberikan konsekuensi yang tidak terpikirkan oleh pemerintah kolonial. Kesemrawutan kekuasaan di kerajaan Jawa pun terjadi, sehingga membuat administrasi pemerintahan kolonial mengalami tumpang tindih. Oleh karena itu agar dapat memudahkan menyusun administrasi maka pada tahun 1799, daerah-daerah tersebut diberi nama baru dan memiliki aturan-aturan tersendiri dan khusus dibandingkan daerah-daerah lainnya. Nama itu adalah Vostenlanden. Kawasan Vostenlanden terdiri dari empat wilayah bekas kerajaan Mataram, Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegara, dan Paku Alam. Lihat G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden" dalam *Overgedrukt uit de Encyclopedie van Nederlandsch-Indië* (Batavia: tp, 1905), 2.

² Rudolf. Mrázek, *Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni*, terj. Hermojo (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), 67.

kemodernan mulai disebar disana-sini, sehingga terkesan bahwa penguasa sebenarnya adalah pemerintahan Belanda bukannya Keraton Surakarta itu sendiri.³

Kondisi sosial tersebut, sedikit banyak turut memberi imbas kepada kehidupan masyarakat Surakarta, perilaku hidup masyarakat Surakarta pun mulai berubah dalam memandang kekuasaan di Jawa. Kemudahan hidup yang mulai dirasakan mengilhami mempertanyakan ke-Jawa-an mereka. Sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa struktur sosial yang berkembang masih sangat kaku, namun pertanyata-pertanyaan untuk menggugat keberadaan diri mereka dalam dunia ke-jawaan mulai terdengar disana-sini. Gugatan itu sebenarnya sudah dimulai oleh pujangga Kraton sendiri yang melihat tanda-tanda zaman yang menunjukkan zaman telah berakhir,⁴ dengan melihat kekuasaan keraton yang semakin kecil.

Tak ayal situasi tersebut menyebabkan pandangan masyarakat awam mulai berubah dalam memandang pakaian yang sedang mereka kenakan. Berfashion yang awalnya hanya tidak hanya milik kaum elit dan selalu berkaitan dalam kekuasaan, kini semakin memudar. Masyarakat awam mulai berani menyamai bahkan melebihi kehebohan model pakaian yang dikenakan kaum priyayi atas.

Ini menarik, pertanyaannya apakah perubahan *life style* para priyayi cilik tersebut memiliki keterkaitan dengan modernisasi sebagai asumsi diatas, atau memang murni sebuah keinginan untuk membangun identitas diri. Artinya apakah para priyayi cilik tersebut sekedar mengikuti perubahan zaman dengan bergaya hidup modern atau memang ada ideologi-ideologi yang tersembunyi dibalik perubahan gaya berpakaian tersebut? Hal ini karena kebebasan memakai segala sesuatu ini pada umumnya dilakukan oleh sebagian besar pembesar Jawa, apakah mereka raja atau priyayi besar. Bagaimana hal itu bisa dijelaskan dan apa implikasinya terhadap perkembangan kebudayaan di Jawa?. Oleh karena itu, tulisan ini beragumen bahwa pakaian bukan semata-mata berfungsi pelindung tubuh atas panas dinginnya cuaca, akan tetapi merupakan salah satu pertanda yang paling jelas dari sekian penanda atas penampilan luar seseorang untuk mengidentifikasi ideologi-ideologi yang dibawa oleh pengguna pakaian tersebut.

Method

Artikel tentang kultur pakaian priyayi Surakarta 1900-1920 ini menggunakan pendekatan multidisipliner⁵ yang terdiri dari ilmu sejarah, antropologi, sosiologi serta politik. Penggunaan pendekatan ini dikarenakan gaya pakaian yang dikenakan oleh priyayi memiliki hubungan yang sangat kompleks dan saling terkait antara satu disiplin ke disiplin lainnya. Dalam penelitian ini, pendekatan sejarah digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah masa lampau yang berkaitan dengan masalah perkembangan fashion priyayi. Pendekatan antropologi bertujuan dapat mempertajam analisis yang menyangkut *life style* priyayi tersebut dalam

³ Bersamaan dengan hal itu, Belanda mulai memperkenalkan dan menyeragamkan mata uang yang berlaku di Hindia Belanda Penyeragaman ini dimulai pada tahun 1899-1917. Lihat Pieter Creutzberg dan J.T.M. Van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, terj Kustiniyati Mochtar dkk (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), 311.

⁴ Ranggawarsita mengatakan demikian bertepatan dengan pembangunan rel-rel kereta api antara Semarang ke Vostenlanden. Mengenai ungkapan-ungkapan setidaknnya lihat S. Margana, *Pujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kolonial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.182-188.

⁵ Sartono Kartodirjo, *Multidimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasional dan Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 91.

keterkaitannya dengan gejala sosial budaya masyarakat, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana priyayi Surakarta di masa lampau menghadapi perubahan budaya.⁶ Adapun sosiologi politik bertujuan untuk mengetahui keterkaitan penggunaan pakaian dengan perkembangan struktur sosial masyarakat yang berkembang di Surakarta. Hal ini karena gaya berpakaian priyayi sebagai fenomena historis, gaya hidup sangat erat hubungannya dengan faktor sosial politik kolonial.

Adapun pendekatan politik dapat dipakai untuk menjelaskan kaum priyayi Surakarta memperoleh kekuasaan. Pakaian merupakan salah satu simbol dari berbagai simbol yang ada untuk menunjukkan status sosial dan identitas diri. Orang akan memberikan penilaian lain terhadap seseorang yang mengenakan pakaian yang berbeda dengan dirinya. Seorang ulama' dengan mengenakan pakaian kekhasannya tentunya akan disegani dan dihormati oleh masyarakatnya. Begitupula dengan seorang bupati dengan memakai seragam dinas, ia dengan mudah disegani oleh masyarakatnya. Dengan demikian, pakaian merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mendefinisikan peran sosial yang dimiliki seseorang.

Untuk meneropong modernisasi pakaian tersebut dibutuhkan *teori modernisasi*.⁷ Menurut David E. Apter modernisasi adalah sejenis harapan khusus yang melekat di dalamnya sebuah revolusi sejarah masa lampau dan sebuah keinginan untuk berbuat yang lebih tinggi.⁸ Dengan demikian, ketika modernisasi mulai mempengaruhi proses perubahan sosial, setiap manusia menginginkan perubahan tidak hanya kepada aspek-aspek yang lebih luas, misalnya politik, tetapi juga kepada bagaimana ia berpenampilan. Hal ini modernisasi mengakibatkan adanya perbaikan nasib, tidak saja dalam ekonomi, politik, tetapi juga budaya.⁹

Namun demikian, menurut Simmel dalam David Chaney mengungkapkan bahwa pakaian tidak eksklusif dalam modernitas, tetapi sebuah ilustrasi perennial dari temanya mengenai interdependensi bentuk dan isi. Ia menunjukkan tanda untuk menegaskan sebuah identitas sosial dan secara bersamaan membiarkan individu membedakan dirinya dengan orang lain.¹⁰ Kenyataan itu menunjukkan pakaian berkaitan dengan simbol kelas sosial. Bentuk-bentuk simbolis itu dalam konteks sosial tertentu mewujudkan dalam pola atau sistem yang disebut dengan kebudayaan. Karena itu, tak heran apabila gaya hidup dalam hal ini berpakaian, kerap kali menunjukkan simbol-simbol yang dapat menopang dan mendukung status dan kekuasaannya.

Dalam *teori kekuasaan Jawa*,¹¹ kekuasaan tidaklah harus diungkapkan secara jelas, tetapi cukup dengan ungkapan simbolik. Dalam hal ini, dapat terwakili oleh pakaian, dimana ia tidak saja sebagai penutup tubuh seseorang tetapi sebuah ungkapan tentang kepribadian dan keinginan dari pemakai pakaian tersebut. Oleh karena itu, untuk

⁶ Koentjaraningrat, *Metode Antropologi; Ichtisar dari Metode-metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas, 1958), 135.

⁷ David E. Apter, *Politik Modernisasi*, terj. Hemawan Sulistyono dan Wardah Hafidz (Jakarta: Gramedia, 1987), 1.

⁸ *Ibid.*

⁹ Astrid S Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 204

¹⁰ David Chaney, *Lifestyles: sebuah Pengantar komprehensif* terj. Nuraeni (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 100.

¹¹ Benedict R.O'G. Anderson, "Gagasan Tentang Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa", dalam Miriam Budiardjo (ed.), *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), 94.

meneropong fenomena yang lahir dibalik pakaian tersebut, dibutuhkan *teori symbol*, untuk membaca simbol-simbol apa yang lahir dalam setiap penggunaan pakaian tersebut. Menurut Raymond Firth sebagaimana yang dikutip oleh Dillstone, simbol mempunyai peranan yang sangat penting dalam urusan-urusan manusia, dengannya manusia dapat dengan mudah menata tatanan, menafsirkan realitanya dan merekonstruksi realitasnya.¹² Oleh karena itu, simbol dapat menjadi sarana untuk menegakkan tatanan sosial dan kepatutan-kepatutan sosial. Hal ini karena pakaian bisa dimetaforakan sebagai kulit sosial yang menghubungkan antara dirinya dengan dunia sosial, sehingga ia dapat menghasilkan berbagai pemikiran individual untuk mengungkapkan realita kehidupan. Di samping itu, Menurut David, institusi sosial pakaian merupakan suatu cara aksi yang dirancang oleh perkembangan industri konsumen, sehingga dinamika perubahan yang terjadi dalam gaya berpakaian dapat menunjukkan proses pembentukan gaya hidup yang lebih luas maknanya.¹³

Hasil dan Pembahasan

Struktur sosial Masyarakat Surakarta

Sistem sosial masyarakat Surakarta pada awal abad XX tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan kota Surakarta ini sendiri. Sebagaimana penulis sebutkan dimuka, bahwa sejak pemilihan kawasan kerajaan ini pada tahun 1742, daerah Sala telah menjadi permukiman multi etnis mulai dari masyarakat Arab, Tionghoa, Madura, Jawa dan masyarakat Belanda.¹⁴ Sebagaimana layaknya struktur sosial masyarakat tradisional pembagian struktur tersebut memiliki sifat yang tertutup. Struktur sosial yang tertutup ini semakin kuat ketika mendapat dukungan dari kekuasaan kolonial yang semakin berhasil menguasai politik kerajaan Surakarta.

Pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan stratifikasi sosial masyarakat yang ada di Hindia Belanda. Peraturan tersebut tertuang dalam *Indische Statregeeling* (IS) pasal 163. Pada pasal tersebut dijelaskan dalam pasal tersebut, bahwa rakyat kolonial dibagi menjadi tiga golongan pokok, yaitu golongan Eropa, Timur Asing dan Bumiputera. Sehingga bila diperas lagi maka dapat dikemukakan bahwa struktur sosial masyarakat Surakarta terbagi menjadi dua, yaitu pribumi dan non pribumi.

Masyarakat Bumiputra terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan atas yang terdiri dari para pembesar dan para priyayi dan golongan cilik yang terdiri dari petani, buruh tani, buruh batik, pedagang, pengrajin dll.¹⁵ Bangsawan adalah sekelompok sosial atas yang memiliki hubungan genealogi dengan raja. Mereka adalah patih, sentana, bupati, para keluarga raja. Mereka itu seluruhnya juga disebut dengan para priyayi. Sebutan yang terkesan tumpang tindih ini disebabkan karena para priyayi ini merupakan nama sebutan bagi orang yang memiliki pekerjaan halus. Para priyayi yang menduduki kedudukan tinggi di kerajaan disebut dengan priyayi *gede*.¹⁶

¹² F.W. Dillistone, *The Power Of Symbols* Terj. A. Widyamartaya (Yogyakarta: Kanisius, 2002),103.

¹³ David Chaney, *Lifestyles: sebuah Pengantar komprehensif*,99.

¹⁴ Lihat Radjiman, *Sejarah Surakarta Tinjauan Politik dan Sosial* (Surakarta: UNS, 1993), 10.

¹⁵ Lihat Onghokham, "Korupsi dan pengawasan dalam Persepektif Sejarah" dalam *Prisma*, No. 3 tahun XV, 1986. 3

¹⁶ Sartono Kartodirjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: UGM Press, 1993), 1

Bersamaan dengan perkembangan birokrasi kolonial dan agro-industri pada pertengahan abad XIX, pemerintah kolonial membutuhkan penguatan administrasi, sehingga banyak jabatan-jabatan dalam pemerintahan kolonial yang mulai diisi oleh *priyayi cilik*, seperti juru tulis, penarik pajak, kasir dan lain sebagainya.¹⁷ Sekalipun di sebut priyayi cilik, akan tetapi tetap saja mereka memiliki pengaruh besar dalam masyarakat awam. Kedudukannya yang disebabkan pendidikan kolonial menyebabkan mereka menjadi “raja” kecil di tengah masyarakat.

Kuatnya pengaruh barat yang masuk ke dalam kehidupan politik Kerajaan sebagaimana yang penulis sebutkan, ternyata tidak mengubah sistem hierarki tradisional yang sudah ditentukan sejak zaman Kerajaan Mataram. Posisi atau kedudukan seseorang di dalam hierarki sosial masyarakat Surakarta bila disimpulkan terdapat dua kategori: yaitu *pertama* keturunan atau hubungan darah seseorang dengan penguasa mengingat di dalam tata masyarakat feodal, raja adalah sebagai intinya atau yang berada di lapisan paling atas, maka keturunan tersebut dikhususkan bagi keturunan raja atau keluarga raja yang disebut bangsawan yang *kedua* kedudukan seseorang ditentukan dalam hierarki atau pemerintahan.

Adapun mereka yang disebut dengan masyarakat non pribumi adalah mereka yang dikelompokkan menjadi dua golongan pokok, yaitu golongan Eropa dan Timur Asing. Dalam undang-undang, kedua golongan ini memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Golongan Eropa umumnya dan orang Belanda sendiri khususnya, mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh golongan lain. Pada tahun 1900 kebanyakan mereka datang tanpa di dampingi oleh keluarga, sehingga banyak dari mereka yang mengambil istri wanita pribumi. Umumnya golongan Eropa dan Belanda menduduki jabatan penting dalam birokrasi pemerintahan.

Golongan Timur Asing yaitu orang yang bukan termasuk orang Eropa terdiri dari orang India dan terutama orang Tionghoa dan Arab. Munculnya orang-orang Arab di Surakarta sejak abad ke XX membawa akibat semakin kompleksnya struktur masyarakat Surakarta. Mereka menempati tiga wilayah kelurahan di Surakarta, yaitu Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kedung Lumbu. Orang-orang Arab, sebagai golongan yang secara budaya homogen, mereka merupakan golongan minoritas yang jelas batas-batasnya dan terpisah dari masyarakat luas, serta mempunyai sistem budaya yang berbeda dengan orang Jawa.¹⁸ Namun, jumlah orang Arab di Surakarta masih kurang banyak dibandingkan orang Tionghoa. Hal ini karena orang Tionghoa merupakan golongan Timur Asing yang paling banyak jumlahnya.¹⁹ Masyarakat Tionghoa dan Masyarakat Arab

¹⁷ Suhartono, *Apanage dan Bekel; Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 33

¹⁸ Cliffrod Geertz, *Abangan, Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa* terj. Aswab Mahasin (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), 11.

¹⁹ Pada tahun 1861 misalnya, kota ini dihuni oleh sekitar 717,135 jiwa, yang terdiri dari masyarakat Eropa 1. 595 jiwa, Cina 3.829 Jiwa, Arab 156 jiwa, dua masyarakat asing dari Asia lainnya 454 jiwa, dan masyarakat pribumi sebanyak 711.101 jiwa. Lihat P.J. Veth, *Aardrijkskundig En Statistisch Woordenboek van nederlandsch Indie, Bewerkt Naar de Jongste En Beste Berigten* (Amsterdam: P.N. Van Kamp, 1869), 437. Pada tahun 1870 jumlah masyarakat di Surakarta meningkat menjadi 736.213 jiwa. Kemudian, tahun 1900 populasi masyarakat Surakarta semakin meningkat menjadi 1.512.773 Jiwa. Dengan komposisi masyarakat Eropa 3.637 jiwa, 9.265 orang Cina, 171 Arab, 262 masyarakat asing dari Asia lainnya, dan 1.499.438 jiwa masyarakat Jawa. Tujuh belas tahun kemudian tepatnya pada tahun 1917, laju populasi masyarakat semakin terlihat di Surakarta dengan

memiliki peran vital dalam tataran masyarakat kecil. Hal ini karena mereka tidak saja sebagai distributor barang dagangan, tetapi juga pengontrol peredaran uang di tengah-tengah masyarakat

Persepsi Priyayi Surakarta tentang pakaian

Kedudukannya sebagai elite sosial mengharuskan seorang priyayi memiliki sopan santun dalam pergaulan. Tidak hanya berperilaku tetapi juga berbusana. Pakaian menurut kaum bangsawan merupakan perwujudan statusnya sebagai elite yang menduduki strata tertinggi di tengah-tengah masyarakat. Pakaian yang dipakai di tubuh tidak saja penutup tubuh dari dinginnya malam dan teriknya siang, tetapi juga mengartikan priyayi akan siapa jati dirinya. Oleh sebab itu, priyayi dituntut untuk pintar memilih dan memilah busana yang akan dikenakannya.

Dalam konteks ini, kehidupan seorang priyayi selalu dituntut oleh beberapa piwulang yang menjadi pedoman hidup. Dalam serat *Wulareng* misalnya, ditekankan bagaimana seseorang harus berperilaku. Hal mana, di setiap langkah, manusia Jawa harus memperhatikan akan kedudukan status sosialnya. Oleh karenanya, harus mengerti bagaimana bersikap diantara *wong agung* dan *wong asor*.²⁰ Sekalipun kaum priyayi sebagai manusia bebas memiliki kehendak untuk maemakai pakaian sesuai dengan keinginannya, namun kenyataannya tidak demikian. Terdapat aturan-aturan ketat yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Surakarta. Aturan dan larangan itu tidak hanya berlaku pada masyarakat awam, tetapi juga mereka yang berasal dari priyayi, baik itu priyayi gede maupun cilik bahkan seorang raja bawahan, ketika dalam kehidupan sosial. Hal itu berbeda ketika dalam kehidupan privat.²¹ Larangan-larangan dan aturan aturan tersebut merupakan sebuah kontrol sosial dari pihak penguasa, agar kekuasaannya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan tidak saja penguasa dengan bawahannya, tetapi juga penguasa dengan penguasa lainnya. Hal ini terlihat dari bagaimana Mangkunegaran IV disibukkan dengan pakaiannya ketika akan menghadap Pakubuwono IX.²²

penambahan jumlah penduduk mencapai 2.060.870 jiwa. Lihat Suhartono, *Apanage dan Bekel*, hlm. 196. Menurut intepretasi penulis, kenaikan populasi masyarakat Jawa di Surakarta tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial politik di Jawa. Pada abad ke-20, situasi Jawa tidak lagi dipengaruhi oleh banyak peperangan, walaupun ada, hanya dalam skala rendah dan bersifat lokal, sehingga dapat dipastikan bahwa pertumbuhan penduduk tidak tersendat. Peperangan terakhir dan terbesar hanya ketika terjadi perang Diponegoro atau dikenal dengan perang Jawa (1825-1830). Mengenai pemberontakan dan kerusuhan di abad XX lihat, Anonim, *laporan-laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad XX* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1981).

²⁰ Gusti Subadiyo, *Serat Wulareng* terj. Tim Penulis (Semarang: Dahara Prize, 1991), 98.

²¹ Sekalipun demikian, berbeda dalam hal merokok, bagi priyayi Surakarta, merokok adalah perbuatan yang memalukan. Mereka lebih baik bunuh diri daripada mereka ketahuan merokok oleh kawan sejawatnya sekalipun dalam dunia privat. Karena itu, para priyayi surakarta hanya akan merokok ketika tidak ada orang.

²² Disebutkan pada tahun 1871-an, setelah menyelesaikan bangunan Langenharja, Pakubowono IX memanggil Mangkunegara IV untuk menghadap. Ia ingin menunjukkan tempat beristiratnya kepada Mangkunegara. Kedudukan yang sama dengan Pakubuwono menyebabkan Mangkunegara IV agak repot untuk memilih pakaian yang akan dikenakannya ketika menghadap Pakubuwono IX. Hendak mengenakan *beskap* atau *atela* tidak sesuai, karena baju itu hanya pantas dipakai oleh para abdi ndalem, sedangkan ia bukanlah abdi ndalem. Hendak memakai baju *takwa sikepan*, juga tidak sesuai karena undangan yang disampaikan bukanlah acara resmi. Oleh karena itu, agar secara simbolik kedudukan Mangkunegara IV tidak tampak berada dibawah kedudukan Pakubuwono IX, maka ia mencoba berimprovisasi dengan memakai baju rok Eropa yang telah dimodifikasi. Dengan baju alternatif itu, ia ingin menunjukkan kesan dan pesan bahwa posisi kedudukannya dengan Pakubowono IX sejajar. Kesejajaran kedudukan tersebut diungkapkan dengan bentuk pakaian yang berbeda dengan pakaian yang ada pada masa itu. Sejak saat itu, muncul istilah baju *Langenharjan* atau disebut juga *beskap Landhung*, sebagai pakaian yang tidak

Akan tetapi, merosotnya kekuasaan raja-raja Jawa pada abad 18-19 menyebabkan bergesernya paradigma masyarakat Jawa, khususnya para priyayi. Pandangan-pandangan baru lahir di kalangan para priyayi, yang tersirat terungkap dalam karya sastra priyayi. Etika satria digantikan etika priyayi, cita-cita *nggayuh utami* dalam artian nilai-nilai sosial keraton digantikan dengan cita-cita mobilitas sosial dalam mencari kedudukan baru. Rupanya hal ini menyebabkan lahirnya pandangan baru dalam konsepsi berpakaian golongan priyayi. Pakaian tidak saja simbol jati diri dan status sosial tetapi juga sebuah alat untuk menampilkan rasa ketidaksukaannya atas aturan-aturan yang ada. Sebagaimana yang didengungkan oleh Boedi Oetomo 1908 kemudian diikuti oleh Sarekat Islam 1912.

Sebagai perkumpulan priyayi, Boedi Oetomo selalu mengusung ide-ide kemodernan. Berdirinya perkumpulan ini yang bersamaan dengan pemugaran Borobudur merupakan perlambang bahwa perkumpulan ini menginginkan adanya kekokohan budaya dengan memperpadukan dua budaya antara budaya Jawa dan budaya Barat, dengan tanpa mengkhianati warisan bangsa. Karenanya, jiwa kemoderanan tersebut tidak saja diungkapkan dalam beberapa surat kabar, *Medan Prijaji*, dan *Pewartu Priyayi*⁶⁸ misalnya, tetapi juga diungkapkan dengan banyaknya anggota Boedi Oetomo yang mengenakan pakaian Eropa. Pakaian Eropa merupakan lambang dari sikap hidup modern dan rasional, meskipun terkadang tetap menunjukkan diri dalam ciri-ciri yang konservatif.²³

Tidak jauh beda dengan Boedi Oetomo, Sarekat Islam, sebagai gerakan politik, perkumpulan ini melakukan pengucapan identitas juga melalui pakaian, meskipun dalam konteks yang berbeda. Anggota Sarekat Islam kerap kali melakukan propaganda dengan menganjurkan masyarakat pribumi untuk berpakaian Eropa. Dalam kajiannya, Krover menyebutkan bahwa mengenakan pakaian Eropa bagi kalangan Sarekat Islam menjadi sebuah tindakan politis untuk menentang tata cara penghormatan Eropa dan dominasi kelas penguasa di kalangan masyarakat pribumi.²⁴ Dengan demikian, perubahan politik telah menyebabkan berkembangnya persepsi priyayi mengenai pakaian. Tidak saja sebagai tekanan kepada “dunia” akan status sosialnya, tetapi juga melambungkan lahirnya sebuah era baru.

Ragam pakaian priyayi Surakarta

Akhir abad ke-19 kebanyakan priyayi Surakarta masih memakai pakaian tradisional. Hal ini karena pada dasarnya, pakaian yang dipakai oleh para priyayi pada abad ke-19 merupakan gaya pakaian yang sudah berlaku turun temurun, hanya “negara” kemudian yang mengatur pemakaian busana tersebut. Catatan-catatan sejarah mengenai pakaian priyayi, biasanya tercantum dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Peraturan itu dikeluarkan untuk mengatur pakaian para abdi termasuk para priyayi dalam pekerjaannya di kerajaan. Dalam acara resmi kerajaan misalnya, priyayi yang bekerja sebagai wedana memakai baju *sikepan* besar *sangkalat* hitam dengan dilengkapi oleh songkok bludru hitam

resmi, dan dipergunakan bagi mereka yang berkedudukan sederajat. Marbangun Hardjowirogo, *Manusia Jawa*, cet 3, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), hlm. 78.

²³ Kuntowijoyo, “Sastra Priyayi sebagai Sebuah Jenis Sasta Jawa” dalam *Basis* XXXVII, no. 9, September 1988.. 339.

²⁴ A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Ratu Adil* terj. Tim Penerjemah (Jakarta: Gratifi Press, 1985).

yang pinggirannya memakai renda mas, *gilig lampanan*. Dilengkapi pula dengan keris dengan *warangka gayaman, sruwal panji-panji*, gasper, kaos kaki hitam dan sepatu.²⁵

Di lain kesempatan, dalam acara jamuan makan bersama, antara priyayi Wedana dan gubernur jendral, maka pakaian yang dikenakannya hampir serupa ketika dalam acara resmi lainnya. Bedanya, ia harus memakai *sabuk cindhe kembang, kebara boli yan kembang suruh* serta *bebet* dan *gasper* tanpa *cincingan*.²⁶ Namun secara umum, pakaian resmi sehari-hari para priyayi adalah baju *atela* berwarna putih atau hitam dengan dilengkapi oleh blangkon dan keris. Sartono menambahi pakaian resmi lainnya adalah *dodotan, kanigaran* dan *keprajuritan*. Tiga yang disebutkan terakhir tersebut, pemakaiannya harus disesuaikan dengan pangkat dan jabatan seorang priyayi yang memakainya.²⁷

Di Surakarta tempat berkembangnya kebudayaan lama, lebih menempatkan Sunan, dan sanak keluarganya serta para bupati sebagai pihak yang paling dihormati. Sehingga pakaian yang dikenakan pun memiliki ciri khas tersendiri. Oleh karena itu meskipun model pakaiannya sama, antara pakaian priyayi bangsawan maupun bukan priyayi kecil akan tetapi motif dan bahan pun berbeda. Para sunan serta para priyayi bangsawan seperti para bupati memiliki kebebasan yang cukup luas dalam memilih pakaian, bahkan mereka kerap memakai simbol-simbol budaya Belanda. Sehingga pakaian Eropa merupakan pakaian yang tidak asing bagi mereka.²⁸

Dalam sehari-hari atau ketika keluar rumah, pakaian priyayi adalah lurik (kemeja), dengan memakai kain panjang sebagai *bebet* tubuh bagian bawah dan dilengkapi dengan blankon.²⁹ Kadang memakai baju putih dengan berpeci gaya Padang sebagai tutup kepalanya.³⁰ Pakaian semacam ini merupakan pakaian yang umum dipakai oleh masyarakat Jawa. Kedudukan seseorang dapat dikenali dengan melihat motif dan bahan dasar dari pakaian tersebut.

Penggunaan peci juga acapkali digunakan oleh priyayi, utamanya priyayi cilik. Dikenalnya peci dalam kehidupan priyayi akibat adanya pengaruh dari orang-orang Hadramaut yang telah mukim di Nusantara ribuan tahun lalu. Di samping itu pada tahun 1902 masyarakat di Hindia Belanda telah terjangkit penyakit yang dikenal dengan penyakit wisata, yaitu keinginan yang menggebu-gebu dalam melakukan perjalanan ke daerah-daerah di Hindia Belanda. Hal itu kemudian mengakibatkan tercampurnya budaya satu daerah dengan budaya di daerah lainnya.

Pembentukan Citra dalam Pusaran Zaman

Pembentukan citra diri tidak dapat di dapatkan secara mudah dilakukan oleh priyayi cilik tanpa adanya sebuah proses panjang. Proses pembentukan budaya dimulai semenjak dalam sekolah. Penyusupan pandangan-pandangan Barat mengenai pakaian di sekolah mulai

²⁵S. Margana, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 297.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Sartono Kartodirjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, 39.

²⁸ Penggunaan pakaian Eropa tersebut membuat para bupati lebih senang dan diperbolehkan oleh para residen untuk duduk di kursi. Adapun para wedana yang tidak diperkenankan memakai pakaian Eropa, tidak diperkenankan pula duduk di kursi juga, karena dianggap *degsura*. Lihat Kartini, *Surat-Surat Kartini; Renungan tentang dan Untuk Bangsa* terj. Sulastin Sutrisno (Jakarta: Djambatan, 1985), 70.

²⁹ RM. Karno dan Mooryati Soedibyo, *Riwayat dan Falsafah Hidup Ingkang Sinoehoen Sri Soesoehoenan Pakubuwono ke- X; 1893-1939* (Surakarta: tp, 1990),120.

³⁰ Endeman, *Dr. Cipto Mangunkusumo; Pahlawan Pergerakan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, ttp), 19.

meningkat. Meskipun hal itu tidak sesederhana yang kita bayangkan saat ini, dimana kemudian banyak siswa yang terpengaruh oleh budaya-budaya modern. Namun demikian, kaum pelajar dinilai sebagai agen penting dalam proses penataan peradaban baru, karena melalui kaum pelajarlah unsur-unsur baru dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam kehidupan masyarakat. Sekalipun Kartini menyebutkan bahwa dengan bersekolah kami sekali-kali tidak hendak menjadikan para siswa menjadi orang setengah Eropa atau orang Jawa yang kebarat-baratan,³¹ tetapi dalam kenyataannya, budaya Eropa melalui simbol seragam menjadi sebuah kebudayaan yang tidak dapat dilepaskan oleh para pelajar itu sendiri. Oleh karena itu, simbol-simbol kuasa politik pemerintah kolonial dalam memonopoli pembentukan identitas para bangsawan dan priyayi Surakarta lahir dalam sebuah pakaian seragam. Margono Djojohadikusumo menulis dalam memoarnya bahwa masa-masa awal sekolah di sekolah Eropa tahun 1901, merupakan masa yang menyakitkan baginya. Hal ini karena memakai atau tidak memakai sepatu memainkan peran yang penting di sekolah.³²

Sembilan tahun kemudian, pada tahun 1910, siksaan dan rasa tidak nyaman mulai luntur. Bersamaan dengan hal itu, banyak pelajar dari kalangan priyayi muncul secara mencolok dengan menggunakan dasi, ikat pinggang dan sepatu. Mereka semuanya hampir tanpa terkecuali berpakaian rapi, bahkan sebagian dari mereka dapat dikatakan *dandy*. Mereka menjadi “belanda-belanda” baru di tengah-tengah ratusan masyarakat Jawa. Nama “Belanda” ketika itu tidak hanya dipakai oleh orang Belanda totok saja, asalkan saja ia bercelana panjang, maka orang itu juga dinamakan Belanda.³³ Dengan kata lain, gemerlapnya seragam sekolah tidak lagi merupakan simbol kekuasaan kolonial, akan tetapi menjadi dambaan kaum terpelajar dalam relung kehidupan mereka.

Pertumbuhan produk budaya dalam berfashion tersebut mendapat perhatian yang serius di kalangan priyayi kecil yang terlebih dahulu lulus dari sekolah. Bahkan tidak jarang memancing perdebatan-perdebatan tajam diantara mereka (priyayi gede dan priyayi kecil) tentang pentingnya menjaga kebudayaan atau mengikuti kemajuan yang ada di depan mata. Mereka terbelah menjadi dua kelompok. Pertama, mereka yang merespon dengan rasa tidak peduli bahwa realita kehidupan telah berubah dan tetap memandang bahwa realitas pakaian tetap seperti dahulu. Golongan ini beranggapan bahwa pakaian yang dipakai oleh para priyayi cilik menghilangkan nilai-nilai luhur. Kedua, kelompok yang merespon secara rasional, bahwa zaman telah berubah sehingga mereka perlu mengikuti gerak bandul zaman agar tidak tertinggal jauh. Derasnya arus modernisasi yang menerpa jantungnya kebudayaan Jawa, memungkinkan kelompok ini menjadi golongan yang terbanyak dalam kehidupan sosial di Surakarta. Hal ini dapat dipahami, sebagai aristokrasi, para *priyayi cilik* senantiasa memerlukan penguatan status, sehingga gaya hidup yang dianut pun merupakan sebuah jalan untuk menguatkan statusnya.

³¹ Jean Gelman Taylor, *Kartini in her Historical Context* In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 145 (1989), no: 2/3, Leiden. 300.

³² Margono Djojohadikusumo, *Kenang-kenangan dari Tiga Zaman; Satu Kisah Kekeluargaan Tertulis* (Jakarta: PT Indira, ttp),

³³ Winarsih Partaningrat Arifin, “Sembilan Tahun di Stovia, 1907-1916” dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambari (ed.), *Panggung Sejarah; Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard* (Jakarta. Yayasan Obor, 1999), 487

Cara berfikir, kebudayaan mereka terpengaruh dengan kuat oleh kontakannya dengan orang-orang Belanda. Sikap itu semakin terlihat jelas dari beberapa cerita yang sengaja diungkapkan oleh beberapa penerbit surat kabar saat itu. Citra ideal priyayi terlihat jelas dalam cerita hikayat Siti Mariah yang diterbitkan oleh surat kabar *Medan Prijaji* dibawah pimpinan Tirto Adhi Soerjo. Fisik kuat, berbadan kuat dan besar serta berpakaian trendy merupakan ciri ideal priyayi saat itu.³⁴

Tumbuhnya budaya Pemujaan terhadap Aksesoris modern

Pembentukan tatanan nilai modernis tersebut semakin mengental pada tahun 1916 hingga tahun 1920-an. Budaya kolonial semakin memasuki segala sendi kehidupan priyayi, tidak hanya di Surakarta tetapi hampir di seluruh Jawa. Pakaian tidak lagi hanya sebatas kebutuhan tetapi telah menjadi gaya hidup masyarakat modern Jawa. Perubahan tersebut tentunya menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap barang-barang yang dipakai pada tubuh ketika mereka memakai pakaian. Pada masa kini, barang itu dikenal dengan istilah aksesoris. Maraknya produk Eropa yang diperdagangkan dan ditampilkan dalam estalase toko menyebabkan priyayi cilik Surakarta selain mengenal pakaian modern, mereka juga mengenal aksesoris pakaian.

Penggunaan aksesoris telah dijadikan sebuah intepretasi baru dari seorang priyayi dalam menunjukkan perbedaan identitas dan status sosialnya. Produk-produk zaman modern yang beredar saat itu oleh priyayi Surakarta tidak saja dilihat dari fungsinya semata, tetapi merupakan simbol yang dapat dikaitkan dengan identitas dan status sosial. Dengan kata kata lain, seiring dengan mengemukanya keinginan akan pakaian modern dikalangan priyayi, muncul pula budaya pemujaan terhadap penampilan diri, sebagai bagian dari masyarakat urban.

Parade Celana

Seiring berkembangnya zaman, lahir pula perubahan kultur pada tata nilai, prilaku dan gaya hidup. Perubahan tata nilai tersebut tidak dilepaskan dari peranan aktif pakaian modern yang berhasil menyihir mata para konsumen di Surakarta. Untuk mendukung perubahan kultur ini tidak jarang media massa saat itu mengangkatnya menjadi berita yang menarik, bahkan mengeksposnya secara besar-besar, misalnya surat kabar *De Nieuwe Vorstenlanden* yang terbit antara tahun 1858-1942, harus menyiapkan satu bahkan dua halaman penuh iklan, baik untuk urusan mode atau fashion maupun kebutuhan lainnya untuk menggaet konsumen dari pribumi.³⁵ Hal tersebut tentunya memicu meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan bagi masyarakat Jawa, khususnya di Surakarta dan sekitarnya terkait tentang mode.

Dalam segi berpakaian, pakaian jas barat awalnya dipakai dengan memakai kain jarik sebagai bawahan. Mode semacam ini sempat bertahan lama dikalangan seluruh priyayi, juga berlalaku di kalangan santri perkotaan di Surakarta. Namun lambat laun, hal tersebut kurang praktis. Terlebih bagi priyayi yang bekerja dalam jawatan tertetu dalam administrasi pemerintahan. Kain batik yang dipergunakan sebagai sebagai jarik mulai dibuang. Bagaimanapun indahnya kain batik tersebut, lama kelamaan terlalu menghalangi gerak gerak

³⁴ Dwi Susanto, *Hikayat Siti Mariah; Estetika Perselingkuhan Pramoedya Ananta Toer* (Yogyakarta: Insist Press, 2009), 48.

³⁵ Surat kabar *De Nieuwe Vorstenlanden* 15 Januari 1900.

kinerja priyayi yang bekerja dalam berbagai jawatan milik pemerintah kolonial, maupun di kerajaan. Para Priyayi cilik di Surakarta mulai mengganti kain jarik mereka dengan celana (pantolon)³⁶ dan menjadikannya sebagai “Belanda-Belanda” muda. Lambat laun kain batik yang dibuat penutup tubuh bagian bawah priyayi bergeser ke wilayah kehidupan pribadi (domestik), ataupun dalam acara-acara tertentu.³⁷

Kondisi semacam itu tidak hanya terjadi pada para priyayi secara umum, tetapi juga terjadi pada Para haji yang memiliki usaha sukses pun mencoba pemahaman baru tersebut. Djajadiningrat dalam memoarnya sebagaimana yang dikutip oleh Lombard menyebutkan bahwa seorang usahawan kopra, Haji Muhammad, sekitar tahun 1910-an mulai tertarik dengan berpakaian dengan gaya Eropa. Djajadiningrat mengungkapkan akibat pergaulan yang luas, mobilitasnya yang padat serta kerajinannya Haji Muhammad dalam membaca surat kabar menyebabkan ia berpendapat bahwa kain sarung, teropah serta serban merupakan pakaian yang sangat mengganggu di dalam meraih kesuksesan kerja. Haji Muhammad berpendapat, waktu adalah uang. Untuk mengefisienkan waktunya, ia kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian Eropa, yaitu berpantolan, berjas, bercelana, bersepatu, dan memakai kopyah Turki. Kemudian tidak beberapa lama ia membeli sebuah kereta angin untuk menyingkat waktu bepergiannya.³⁸

Bunyi yang berdetak Indah

Tidak hanya memakai celana, kaum priyayi cilik juga mulai memakai aksesoris yang berupa arloji. Arloji awalnya hanya dipergunakan oleh raja atau priyayi kelas atas, namun sejak tahun 1916, hal itu bukan lagi hanya digunakan oleh raja dan priyayi gede semata, tetapi mulai tersebar dikalangan priyayi cilik di Surakarta, sebagai lambang kesuksesan. Meskipun tolak ukur kesuksesan priyayi cilik tersebut saat itu berbeda-beda, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan membutuhkan kerja keras dan perjuangan. Karena itu ketika sukses telah berada dalam genggamannya, maka penghargaan itu diwujudkan dalam mengkoleksi harta berharga berupa arloji.

Suwarsih Djojopuspito dalam novelnya yang berjudul, *Buiten Het Gareel* mengungkapkan bagaimana arloji menjadi barang mewah yang dimiliki oleh setiap masyarakat dan menjadi simbol sosial pemakainya serta menjadi sumber pemasukan ketika membutuhkan dana.

“...Dari Marti ia akan dapat f 15,- sebulan, selama tiga bulan, sebab Marti tidak mau mengambil arloji yang telah diberikan kepada Sulastri dengan

³⁶ Mengenai negara mana yang kali pertama memakai celana hampir tidak ada data yang menyebutkannya. Namun Goet Poespo, desainer sekaligus penulis sejarah pakaian asal Pasuruhan menduga bahwa budaya ini berasal dari budaya timur. Di Eropa, celana kali pertama dipakai oleh suku Gauls dan suku Germanic, itu pun hanya dari suku Germanic tertentu yang memakainya. Pada abad ke-12, terdapat inovasi dengan menggabungkan kain berbentuk dua pipa (hope) sehingga membentuk bentuk celana seperti saat ini. Mulai saat itu celana disukai di negara-negara Eropa, dan memiliki sebutan sendiri. Celana-celana dengan model *breeches*, *knickerbockers*, dan *pantolan* adalah model celana yang berkembang pada abad 19 di Eropa, dan memiliki kedekatan dengan model celana pada masa kini. Lihat Goet Poespo, *Aneka Celana* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 1-3. Oleh karena itu salah satu model celana (pantolan) merupakan model celana yang beredar luas dikalangan masyarakat Jawa pada abad XX.

³⁷ Umar Kayam, *Para Priyayi* (Jakarta: Gratifi Press, 2011).43. Lihat juga Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu*, terj. Winarsih Partaningrat Arifin, Rahayu S. Hidayat, dan Nini Hidayati Yusuf, jilid 1 (Jakarta: Gramedia, 2000), 157.

³⁸ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu*, 157

begitu saja. Arloji itu hanya satu-satunya barang lux yang dapat menghasilkan sedikit uang. Arloji itu berasal dari pemberian Marti, tetapi apakah gunanya arloji tersebut, jika orang sangat butuh uang...”³⁹

Lain halnya dalam foto kolonial yang terdapat dalam tulisannya Jean Gelman Taylor. Foto itu memperlihatkan bagaimana seorang priyayi Surakarta yang berhasil bekerja sebagai sekretaris dan juru tulis Pakubuwono X memakai pakaian barat lengkap dengan memakai aksesoris barat sebagai upaya proyeksi citra diri status sosial sekaligus gaya hidup modern. Simbol-simbol keistimewaan keturunan seperti payung, dibuang dan digantikan dengan barang-barang modern seperti tas, topi, arloji dan sepatu.⁴⁰



Foto itu seakan-akan menunjukkan bahwa aksesoris topi, arloji, sepatu, serta celana dipakai sebagai pencitraan eksklusif seorang priyayi Surakarta yang telah mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan. Couperus mengungkapkan bahwa aksesoris-aksesoris tersebut merupakan simbol keagungan tertinggi di Hindia Belanda.⁴¹ Oleh karena itu, sebagai salah satu aksesoris, arloji bermain dalam simbol yang memberikan kesan dan citra tertentu pada pemakainya, sehingga pemakainya mampu menampilkan penampilan yang elegan dan eksklusif. Sebagai seorang priyayi, gaya hidup sebagai pendukung status sosial sangat diperlukan, sehingga ia kerap menampilkan penampilan yang glamor

Kesopanan Baru

Dari kebijakan ini muncul masyarakat-masyarakat intelektual yang berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang genealogi masa lalu. Keturunan bukan lagi sebuah ukuran, karena meskipun tidak memiliki asas keturunan, tetap saja dapat menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan kolonial. Para priyayi tersebut berusaha menyelami cara berfikir Barat. Karena itu, mereka menganggap dirinya bagian dari elite sosial yang berbeda dengan para bangsawan dan para administrator, namun memiliki kedudukan yang sama dengan kedua kelompok tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Menjelang dasawarsa 1910, nuansa saling kait-mengait tersebut semakin terlihat. Di Surakarta, tempat berkembangnya budaya lama, seperti penghormatan yang luar biasa terhadap keraton dan kekuatan mistiknya mulaimengalami pergeseran. Adat istiadat lama

³⁹ Suwarsih Djojopuspito, *Buiten Het Gareel* (Jakarta: Djambatan, 1975), 152

⁴⁰ Jean Gelman Taylor, “Kostum dan Gender di Jawa Kolonial tahun 1800-1940”, dalam Henk Schulte Nordholt (ed.), *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan* terj. Imam Aziz (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 142.

⁴¹ Couperus Louis, *De Stille Kracht* terj. Chistina Dewi Elbers (Yogyakarta: kanisius, 2011), 51.

mulai mengalami gugatan, budaya seperti kewajiban memakai pakaian tradisional dan kegemaran tari erotis *tayuban* oleh para priyayi mulai mendapat kecaman. Dengan dalih kemajuan pula kemudian tata nilai kesopanan mulai dirasionalkan dengan mengacu kepada etiket Belanda. Istilah sopan bukan lagi milik dunia Jawa, tetapi mulai tersebar dengan mengacu anasir-anasir budaya lain.

Nilai kesopanan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah nilai kesopanan yang diterapkan oleh masyarakat kota. Oleh karena itu, pada halaman prolog naskahnya, Padmasusastra mengemukakan bahwa kehidupan Jawa saat ini telah berubah. Kebudayaan dan tata nilai lama yang kurang cocok harus dirubah dan dibuang. Hal ini karena kita hidup dan bergaul dengan budaya Belanda, sehingga budaya inilah yang menguasai dunia Jawa dan kita wajib untuk mengikutinya.⁴²

Kaum Pesolek

Pakaian modern sedang menjadi mode di mana-mana di Hindia Belanda tahun 1914-an hingga tahun 1920, sehingga menjadi sebuah gaya hidup yang dibanggakan oleh para priyayi Surakarta. Hal itu kemudian membawa dan menumbuhkan jiwa pesolek dikalangan priyayi. Jiwa pesolek tersebut tidak saja sebagai ungkapan prestisius mereka, tetapi juga menunjukkan ideologi kemajuan yang dianutnya. Tulisan Djajawigat mengemukakan gaya hidup kaum pesolek dalam dunia priyayi Surakarta, dengan lebih menyiratkan pernyataan kuat mengenai kelas, dan status sosial. Gagasan mengenai boneka-boneka mode dikalangan masyarakat Jawa terlihat jelas dalam tulisan tersebut. mengatakan;

“...Piyarsakna ngong candrane mangkin, umpamane lurahing Klampisan, lunga jagong lan bojone, kang lang rada besus, iket modhang kemada sungging, pacake cacatheman, carukane alus, bebe bathik kawung kemplang, sabuk lurik gerusan pekek prekentin, timange ulan-ulan. Klambi beskap lurik endhog mimi, benik gulon inten seling mirah, ngapit canthel tanpa klanthe, nyothe kerise mungguh, nyangking wiron tangne kering, dhasar brengose capang, meles den lus-elus...” Artinya.

“...coba dengarkan akan saya lukiskan, misalnya lurah Klampisan, pergi ketempat hajat bersma istrinya, sang suami tampak pesolek, berikan kepala modang kemada sungging, berbusana ikatan rapat sekali, dengan variasi yang halus, berkain batik kawung kemplang, ikat pinggang lurik gerusan perketin, dengan timnga berbentuk ular-ularan. Berbusana beskap lurik kecil-kecil, kancing lehernya bertahtakan intan dan mirah, mengpit cantel tanpa tali, di pinggang terpasang keris, tangan kirinya memegang wiron kain, dasar kumisnya panjang, hitam mengkilat dibelai-belainya...”⁴³

Fotografi kolonial merekam bagaimana kesenangan bersolek dikalangan parapriyayi cilik, dengan memakai pakaian aslinya. Sejak ditemukannya kamera pada abad 18 dan kali pertama studio foto di buka di Batavia pada tahun 1857, para priyayi kerap menampilkan

⁴² *Sêrat Subasita punika kalêmpaking tatakrama Jawi sawatawis campuripun kalihan tatakrama Walandi supados kenging kapirit ingkang taksih pantês kalêstantunakên utawi botên, awit kêncênging tatakramanipun tiyang Jawi kêndho dening pasrawungan kalihan tatakramanipun tiyang Walandi, punika ingkang murba misesa panggêsanganipun têtayang Jawi, wajib dipun lampahi.* Lihat Ki Padmasusastra, *Serat Subasita*, Surakarta: Budi Oetomo, 1914, diposting dalam <http://www.sastra.org/bahasa-dan-budaya/45-pengetahuan-bahasa/921->

⁴³ Djajawigata, *Serat Pepeling lan Pamrayoga* (Semarang: Dahara Prize, 1994), hlm. 43-44.

diri mereka dalam kilatan kamera dengan menggunakan pakaian asli sebagai simbol-simbol gaya hidup dan citra masyarakat metropolis. Meskipun demikian, para priyayi pesolek dengan memakai pakaian Jawa tetap merasa kurang prestisius dibandingkan dengan mereka yang memakai pakaian modern. Hal ini karena pakaian modern atau lebih dikenal dengan pakaian barat semakin mendominasi dunia pakaian di Surakarta dan sekitarnya, sehingga pamor pakaian Jawa kian menipis.⁴⁴ Di samping itu pakaian tradisional sedang mengalami masa suram, harga tinggi, namun penghargaan terhadapnya mulai turun. Sedangkan pakaian Eropa sangat murah⁴⁵ dan berkualitas disertai penghargaan sangat tinggi terhadapnya. Oleh karenanya manusia modern dalam pikiran masyarakat Surakarta awal abad ke-20 adalah seorang dengan pakaian gaya Eropa, maka akan memudahkan mereka untuk terlibat dalam klub-klub rekreasi, bergaya hidup Eropa dan tentunya perpenampilan dengan bergaya Eropa.

Kesimpulan

Diberlakukannya politik etis pada tahun 1901 membawa perubahan yang signifikan dalam diri priyayi cilik di Surakarta. Gerakan dalam diri priyayi Surakarta untuk mendobrak tatanan dan pembatasan berpakaian tersebut muncul. Di sana sini, tumbuh desakralisasi pakaian oleh para priyayi cilik di Surakarta. Utamanya bagi mereka yang menjabat pada jawatan tertentu di pemerintahan kegilaan kepada pakaian Eropa bersemi. Hal itu menyebabkan kegoncangan yang hebat dikalangan para pegawai, sehingga menyebabkan para pegawai Eropa merasa khawatir terhadap pergerakan tersebut.

Nuansa perubahan itu semakin diperkuat dengan lemahnya perdagangan pakaian tradisional di Surakarta. Para pedagang batik Surakarta harus dihadapkan dengan serbuan dan hantaman dari pedagang Asia Timur (Tionghoa dan Arabia) dan Eropa, sehingga kalau pun mereka berhasil lepas dari cengkaman pedagang Asia Timur para pedagang dan masyarakat Jawa umumnya tidak dapat lepas dari serbuan pedagang Eropa yang menyuguhkan kecantikan-kecantikan modernisasi. Hasrat aktualitas dan berestetika dengan menggunakan pakaian menimbulkan dibuangnya aksesoris-aksesoris tempo dulu. Payung dan keris tidak lagi sebagai simbol prestisius dan gaya hidup, tetapi beralih kepada sepatu, arloji serta celana yang menjadi simbol ekspresi budaya baru gaya berpakaian dikalangan priyayi Surakarta. Berubahnya gaya berpakaian tersebut secara tidak langsung membentuk tata nilai kesopanan baru.

Daftar Pustaka

A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Ratu Adil* terj. Tim Penerjemah Jakarta: Gratifi Press, 1985.

⁴⁴ Menipisnya pamor pakaian pribumi ini lebih disebabkan oleh mudahnya *rasa* dalam diri masyarakat bawah terhadap pakaian pribumi. Hal ini terlihat jelas dalam sebuah surat kabar *kaoem Moeda* 25 September 1917 sebagaimana yang dikutip oleh Kess van Dijk, bagaimana seorang pelayan dalam sebuah gedung Bioskop yang menolak kehadiran *Keok* (penulis berita), dan memperlakukan yang tidak menyenangkan ketika ia memakai pakaian pribumi. Akan tetapi ketika ia kembali lagi dengan mengenakan pakaian Belanda dengan dandanan *netjjs*, ia langsung dilayani. Ia kemudian bertanya mengapa dulu ia tidak dilayani, si pelayan menjawab, hampir memberi kesan bahwa dengan mengganti pakaian maka seseorang juga berganti ras, dan dia menyangka *Keok* bukanlah orang Jawa. Lihat Kess Van Dijk, "Sarung, Jubah, Celana; Penampilan sebagai Sarana Pembedaan dan Disriminasi" dalam Henk Schulte Nordholt (ed.), *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan* terj. Imam Aziz (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 93-94

⁴⁵ Dalam laporan yang termuat dalam majalah *Djawa* sebagaimana yang dikutip oleh Denys harga sebuah pantolan dan sebuah kemeja harganya sekitar 11, 80 gulden, sedangkan untuk memperoleh sepotong kain, sebuah surjan, dan blangkon, masyarakat Jawa harus membayar 17 Gulden. Lihat Denys Lombard, *Nusa Jawa*: hlm. 159.

- Anonim, *laporan-laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad XX* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1981)
- Astrid S Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* Bandung: Bina Cipta, 1979
- Benedict R.O'G. Anderson, "Gagasan Tentang Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa", dalam Miriam Budiardjo (ed.), *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa* Jakarta: Sinar Harapan, 1984
- Clifford Geertz, *Abangan, Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa* terj. Aswab Mahasin Jakarta: Pustaka Jaya, 1981
- Couperus Louis, *De Stille Kracht* terj. Chistina Dewi Elbers Yogyakarta: kanisius, 2011
- David Chaney, *Lifestyles: sebuah Pengantar komprehensif* terj. Nuraeni Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
- David E. Apter, *Politik Modernisasi*, terj. Hemawan Sulistyono dan Wardah hafidz Jakarta: Gramedia, 1987.
- Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu*, terj. Winarsih Partaningrat Arifin, Rahayu S. Hidayat, dan Nini Hidayati Yusuf, jilid 1 Jakarta: Gramedia, 2000.
- Djajawigata, *Serat Pepeling lan Pamrayoga* Semarang: Dahara Prize, 1994.
- Dwi Susanto, *Hikayat Siti Mariah; Estetika Perselingkuhan Pramoedya Ananta Toer* Yogyakarta: Insist Press, 2009
- Endeman, *Dr. Cipto Mangunkusumo; Pahlawan Pergerakan Nasional* Jakarta: Balai Pustaka, ttp.
- F.W. Dillistone, *The Power Of Symbols* Terj. A. Widyamartaya Yogyakarta: Kanisius, 2002
- G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden" dalam *Overgedrukt uit de Encyclopedie van Nederlandsch-Indië* Batavia: tp, 1905
- Goet Poespo, *Aneka Celana* Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Gusti Subadiyo, *Serat Wulareng* terj. Tim Penulis (Semarang: Dahara Prize, 1991
- Jean Gelman Taylor, "Kostum dan Gender di Jawa Kolonial tahun 1800-1940", dalam Henk Schulte Nordholt (ed.), *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan* terj. Imam Aziz Yogyakarta: LKiS, 2005
- Jean Gelman Taylor, *Kartini in her Historical Context* In: *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 145 (1989), no: 2/3, Leiden. 300.
- Kartini, *Surat-Surat Kartini; Renungan tentang dan Untuk Bangsaanya* terj. Sulastin Sutrisno Jakarta: Djambatan, 1985
- Kess Van Dijk, "Sarung, Jubah, Celana; Penampilan sebagai Sarana Pembedaan dan Disriminasi" dalam Henk Schulte Nordholt (ed.), *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan* terj. Imam Aziz Yogyakarta: LKiS, 2005
- Ki Padmasusastra, *Serat Subasita*, Surakarta: Budi Oetomo, 1914, diposting dalam <http://www.sastra.org/bahasa-dan-budaya/45-pengetahuan-bahasa/921->

- Koentjaraningrat, *Metode Antropologi; Ichtisar dari Metode-metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia* Jakarta: Penerbit Universitas, 1958
- Kuntowijoyo, "Sastra Priyayi sebagai Sebuah Jenis Sasta Jawa" dalam *Basis* XXXVII, no. 9, September 1988..
- Marbangun Hardjowirogo, *Manusia Jawa*, cet 3, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.
- Margono Djojohadikusumo, *Kenang-kenangan dari Tiga Zaman; Satu Kisah Kekeluargaan Tertulis* Jakarta: PT Indira, ttp.
- Onghokham, "Korupsi dan pengawasan dalam Persepektif Sejarah" dalam *Prisma*, No. 3 tahun XV, 1986.
- P.J. Veth, *Aardrijkskundig En Statistisch Woordenboek van nederlandsch Indie, Bewerkt Naar de Jongste En Beste Berigten* Amsterdam: P.N. Van Kamp, 1869.
- Pieter Creutzberg dan J.T.M. Van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, terj Kustiniyati Mochtar dkk Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987
- Radjiman, *Sejarah Surakarta Tinjauan Politik dan Sosial* Surakarta: UNS, 1993
- RM. Karno dan Mooryati Soediby, *Riwayat dan Falsafah Hidup Ingkang Sinoehoen Sri Soesoehoenan Pakubuwono ke- X; 1893-1939* Surakarta: tp, 1990
- Rudolf. Mrázek, *Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni*, terj. Hermojo Jakarta: Yayasan Obor, 2006
- S. Margana, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- S. Margana, *Pujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kolonial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Sartono Kartodirjo, *Multidimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasional dan Negara Kesatuan* Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Sartono Kartodirjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi* Yogyakarta: UGM Press, 1993
- Suhartono, *Apanage dan Bekel; Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Surat kabar *De Nieuwe Vorstenlanden* 15 Januari 1900
- Suwarsih Djojopuspito, *Buiten Het Gareel* Jakarta: Djambatan, 1975
- Umar Kayam, *Para Priyayi* Jakarta: Gratifi Press, 2011).43.
- Winarsih Partaningrat Arifin, "Sembilan Tahun di Stovia, 1907-1916" dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed.), *Panggung Sejarah; Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard* Jakarta. Yayasan Obor, 1999